

MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

*Sri Eka Astutiningsih**

Abstract

Women have experienced gender inequalities in many aspects of human life, including in education. Education which is ideally accessible equally for everyone, in fact, has been discriminative against women. There are many factors that bring about women marginalization in the field of education including: 1) a strong patriarchal culture; 2) gender biased curriculum, text books, and teaching and learning process; 3) curriculum evaluator, educational advisers, and teachers who does not have gender sensitivity. The most fundamental factor has been male dominated and oriented society. In order to develop more gender equal educational system, therefore, there is a need to restructure the gender biased-curriculum and develop an inclusive gender teaching and learning process. In the process of teaching and learning teachers have to encourage both male and female students to have critical knowledge, behavior, and awareness, emphasize the importance of gender equality, and avoid using gender biased language. There are three significant aspects included in the development of gender equality in curriculum: teacher, student, and the produced knowledge. Gender inequality that results in women marginalization in education, thus, should be eliminated. All have to work hard hand in hand to be able to create gender equality in education.

Kata Kunci: Ketidakadilan gender, marginalisasi perempuan, pendidikan

I. Pendahuluan

Pendidikan menjadi hak siapapun, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, ataupun golongan. Semuanya berhak mengenyam

* Dosen STAIN Tulungagung

pendidikan sesuai dengan minat masing-masing. Namun, idealitas ini sering harus berbenturan dengan realitas. Pendidikan ternyata sarat dengan diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Kegelisahan terhadap ketimpangan pendidikan ini sebenarnya tidak hanya muncul pada era belakangan seiring dengan maraknya gerakan kesetaraan gender. Jauh sebelum gerakan kesetaraan gender muncul, kesadaran terhadap pentingnya pendidikan terhadap kaum perempuan telah disuarakan. RA Kartini adalah sosok yang menegaskan pentingnya makna pendidikan bagi kaum perempuan, sebab sesungguhnya lewat kaum perempuanlah pendidikan pertama kali diperoleh. Menurut Kartini, “..dari perempuanlah manusia itu pertama-tama menerima pendidikan. Di pangkuan perempuanlah seseorang mulai belajar merasa, berpikir dan berkata-kata. Dan bagaimanakah ibu-ibu Bumiputera dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak berpendidikan?”. Kutipan ini merupakan bunyi surat RA Kartini pada tanggal 2 November 1900 bagi Prof. G.K. Anton dan istrinya. Dalam surat tersebut mulai tampak adanya pemahaman dalam diri Kartini akan pentingnya pendidikan bagi perempuan, tidak lain sebagai bekal untuk mendidik anak-anaknya. Menurut Kartini, proses perawatan dan pengasuhan anak dari seorang ibu yang telah tercerdaskan sangat menentukan kualitas anak tersebut.¹

Seiring berjalannya waktu, perlahan namun pasti, semakin dibuka peluang bagi perempuan untuk mengecap pendidikan. Terlebih sejak 1984, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms Diskrimination Against Women-CEDAW*) dalam bentuk Undang-undang nomor 7 / 1984. Berdasar pada UU inilah, perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi pendidikan.

Menurut Budhy Munawar-Rachman, Dalam paruh kedua abad ini, ketika jumlah perempuan-perempuan kelas menengah-atas mulai mendapatkan kesempatan dan akses luas dalam kehidupan di dunia publik,

¹ Surat kartini ini dikutip kembali oleh Neni Utami Adiningsih, “Setelah Perempuan Berpendidikan Lalu? (Cermatan di peringatan 23 tahun Ratifikasi CEDAW, 24 Juli)”, dalam www.mennegpp.go.id, diakses pada 27 September 2007.

baik lewat pendidikan maupun pekerjaan, mulai terjadi kesadaran dalam skala yang kian luas untuk membongkar berbagai relasi gender yang timpang.²

Namun demikian, apa yang dinyatakan oleh Budhy Munawar-Rachman tersebut belum menjadi indikator determinan terhadap terciptanya kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan. Walaupun telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, namun ketimpangan dan marginalisasi terhadap kaum perempuan dalam dunia pendidikan masih saja terus terjadi. Dalam banyak kasus, keterlibatan perempuan belum sampai mencapai taraf terjadinya kesetaraan gender dalam makna yang sesungguhnya. Menurut Julia Cleves Mosse, apa yang diperlukan sekarang bukan hanya “keterlibatan” perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, tetapi lebih dari itu, adalah terciptanya relasi gender yang adil dalam semua hubungan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Mulai dari sektor kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, pendidikan, sosial, politik, hingga kesetaraan dalam hukum.³

Oleh karena itu, seiring dengan semakin menguatnya gerakan kesetaraan gender, merupakan hal yang wajar jika fenomena peminggiran perempuan dalam arena publik menjadi tema diskusi yang terus bergulir, terutama dalam kaitannya dengan konsep dan arah pembangunan yang lebih berkeadilan gender. Dalam konteks ini, peta global yang selalu dikritisi adalah gugatan terhadap konsep dan realitas pembangunan yang cenderung mengabaikan kepentingan perempuan. Akar dari ketidakadilan dalam konsep maupun hasil pembangunan terletak pada ketimpangan relasi gender serta stereotip patriarkis yang memposisikan kaum perempuan sebagai warga negara kelas dua di negaranya sendiri. Selama ini, cara pandang budaya kita sangat kental dengan nilai-nilai patriarki, yaitu budaya yang membuat ruang gerak perempuan hanya melingkar di domain reproduksi. Dalam kerangka budaya patriarki, perempuan tidak

² Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2001), 325.

³ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 27.

memiliki kemandirian diri. Eksistensi mereka selalu berada di bawah bayang-bayang kaum laki-laki.

Pencitraan miring relasi gender ini kemudian berkelindan dengan kebijakan politik pembangunan; *developmentalisme* (pembangunanisme), dan konstruksi cita ideal perempuan. *Developmentalisme* sebagai wacana pembangunan yang banyak disemangati dengan paket ideologi revolusi industri dan proyek modernitas meniscayakan kemajuan ekonomi. Namun dalam prakteknya selalu menimbulkan beragam ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah ketimpangan relasi gender.

Gender dan pembangunan menarik untuk dihubungkan dalam dunia pendidikan karena beberapa alasan. *Pertama*, lembaga pendidikan adalah wadah institusional di mana semua pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, mengekspresikan segala potensinya, mengaktualisasikan dan mendefinisikan identitas dirinya. *Kedua*, lembaga pendidikan merupakan institusi dinamis yang menyiapkan, memproduksi, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. *Ketiga*, lembaga pendidikan mereproduksi ideologi atau doktrin tertentu, baik melalui proses kebijakan atau melalui proses inkulturasi atmosfer kerja. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai diperkenalkan, ditransmisi, dan ditransformasikan. Sebagai implikasi lebih lanjutnya, maka proses pembelajaran dan lembaga pendidikan memiliki peranan signifikan untuk mengkonstruksi ketimpangan atau kesetaraan gender.

Relasi gender dan pendidikan secara epistemologis harus membincang tentang perspektif perempuan tentang pendidikan. Perspektif ini penting untuk dikemukakan agar ditemukan landasan filosofis yang mapan terhadap cara pandang kaum perempuan sendiri terhadap pendidikan. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan persoalan ini. *Pertama*, teori Feminisme Liberal. Teori ini memfokuskan diri pada pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa anak perempuan banyak mengalami kegagalan dalam meraih jenjang pendidikan tinggi. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah mengapa kaum perempuan memilih (diarahkan?) untuk masuk ke jalur pendidikan praktis dan adakah stereotip-stereotip dalam pendi-

dikan? Pembahasan feminisme liberal terutama berkisar pada persoalan akses pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah pada anak perempuan, menyediakan program-program pelayanan bagi anak perempuan dari keluarga tidak beruntung, dan melakukan penuntutan kesetaraan pendidikan yang sifatnya tidak radikal atau tidak mengancam.

Kedua, teori Feminisme Radikal. Teori ini, sesuai dengan namanya, yaitu radikal, yang berarti mencari persoalan sampai ke akar-akarnya. Perspektif ini bertolak belakang dengan kaum feminis liberal. Kaum feminis radikal melihat penyebab utama adanya ketidakadilan bagi perempuan di dalam dunia pendidikan adalah karena sistem patriarkal yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, juga melihat hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, karena hal ini menentukan keterbelakangan perempuan di berbagai bidang. Operasi seksualitas merupakan wacana yang sering dikemukakan oleh teori feminisme radikal untuk menunjukkan bahwa persoalan hak-hak reproduksi, kebutuhan perempuan, dan seksualitas perempuan merupakan pembahasan yang penting untuk memahami ketertindasan terhadap perempuan di segala area, termasuk pendidikan. Diskursus yang dipakai dalam teori ini adalah budaya patriarkal, operasi seksualitas, pemberdayaan perempuan, mensesentralkan kepentingan perempuan.

Ketiga, teori Feminisme Marxis dan Sosialis. Bagi teori ini, ketidaksetaraan dalam pendidikan terjadi karena institusi-institusi pendidikan justru menciptakan kelas-kelas ekonomi. Pendidikan telah dijadikan ajang bisnis yang lebih melayani kelas ekonomi atas. Pendidikan telah kehilangan makna. Pendidikan bukan lagi bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan untuk menguntungkan kantong masing-masing. Hubungan kekuasaan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah terlihat secara gamblang sehingga kelompok miskin tereksplorasi dan berada dalam kebodohan secara terus menerus. Kaum miskin semakin kehilangan kesempatan untuk memasuki dunia pendidikan karena ketidakmampuan dari segi pembiayaan. Dalam teori ini, bahasa-bahasa yang sering digunakan adalah yang berkaitan dengan kelas, produksi, kemiskinan, dan seterusnya.

Keempat, teori Poststrukturalisme dan Postmodernisme. Teori ini pada dasarnya merupakan teori yang mengkritik dan mendekonstruksi filsafat yang memihak pada “fondasionalisme dan absolutisme”. Definisi pendidikan yang sangat berpusat pada laki-laki (*male centered*) dipertanyakan. Teori ini hendak membongkar semua anggapan-anggapan yang diterima begitu saja. Konsentrasi yang dilakukan teori ini adalah melihat semua diskursus-diskursus yang ada (teks-teks) yang ada dalam pendidikan yang melakukan operasi bawah sadar sehingga terjadi *pe-natural-an* bahasa-bahasa yang bias gender. Oleh sebab itu, teori ini bukan saja mengajak mereka yang berkepentingan dengan pendidikan untuk mengubah kurikulum, tetapi juga melihat bagaimana kurikulum yang bias gender terbentuk dan kemudian beroperasi secara luas.⁴

II. Faktor Penyebab Ketimpangan

Ketimpangan peran perempuan dalam dunia pendidikan memiliki faktor penyebab yang cukup rumit dan kompleks. Salah satunya bersumber dari buku teks yang diajarkan di sekolah. Ahli filsafat sekaligus aktifis gender, Karlina Leksono-Supelli telah melakukan telaah kritis terhadap buku-buku pelajaran di sekolah dasar. Buku-buku Sekolah Dasar yang ditinjau berasal dari penerbit yang berbeda; tidak semuanya merupakan buku wajib, sebagian merupakan buku penunjang yang dipakai di sekolah-sekolah swasta. Buku-buku itu ditinjau secara acak, baik dari segi isi maupun teknik penyajian, dan penggunaan bahasa.

Dari hasil telaahnya ditemukan bahwa ideologi negara mendasari pemahaman mengenai peran laki-laki dan perempuan, individu, dan masyarakat. Ini menyebabkan penyajian teks seringkali tidak tajam karena fakta, konsep, dan ideologi bercampur baur. Kondisi teks yang semacam ini jelas memperberat anak dalam mencerna bahan-bahan pelajaran, apalagi ketika secara teknis ada keinginan untuk memberi anak pengetahuan sebanyak-banyaknya.

⁴ Gadis Arivia, *Feminisme, Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Kompas, 2006), 413-414.

Salah satu buku yang ditelaah adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran IPS mulai diberikan di kelas 3 SD dengan fokus lingkungan, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Adapun kajian sejarah dimulai di kelas 4. Buku pelajaran IPS dimulai dengan kondisi paling dasar, keluarga. Di belakang pengenalan terhadap lingkungan keluarga, tersembunyi pertanyaan, "Siapakah saya?". Pertanyaan ini kemudian dihubungkan dengan kenyataan bahwa semua orang mempunyai keluarga. Setelah keluarga inti diperkenalkan, teks membicarakan fakta kehidupan keluarga sehari-hari, termasuk tugas, kewajiban, dan hak anggota-anggota keluarga, termasuk beberapa hal anak. Sementara itu murid juga diminta untuk menyebutkan hak-hak anak yang lainnya (disebutkan tiga butir hak anak sesuai Konvensi Hak-Hak Anak pasal 3 ayat 2 tentang memperoleh perlindungan dan perawatan, pasal 28 ayat 1 tentang hak atas pendidikan, dan pasal 13 ayat 1 tentang kebebasan menyatakan pendapat).

Dalam buku yang ditinjau, ada dua keluarga yang dicontohkan. Keluarga pertama mempunyai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Ayah bekerja sebagai pegawai swasta, dan ibu membuka warung di rumah. Rumah tangga dapat berjalan dengan baik karena pekerjaan dilakukan bersama dengan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah menjalankan tugas utama pelajar, anak laki-laki membantu pekerjaan luar rumah seperti mengurus ternak peliharaannya dan menjaga warung, sedangkan anak perempuan menyapu, mengepel, memasak, mencuci piring, dan sekali-sekali ikut menjaga warung. Mereka berdua boleh menonton televisi pada jam-jam tertentu. Sementara pada keluarga kedua yang dicontohkan, mereka mempunyai dua orang anak laki-laki. Ayah seorang guru SD dan ibu bekerja di perusahaan swasta. Anak tertua mengerjakan pekerjaan yang lebih berat seperti mengisi bak air dan mencuci pakaian. Adiknya menyapu dan mencuci piring.

Setelah melakukan tinjauan dan analisis atas teks buku pelajaran tersebut, Karlina menyimpulkan bahwa secara umum, teks-teks untuk kelas 3 SD untuk caturwulan pertama cukup menarik, tidak bersifat dogmatis, dan disampaikan dengan sederhana. Namun, yang mencolok

adalah stereotip peran perempuan seperti terlihat dalam dua contoh di atas. Ini diperkuat di dalam bagian hak dan kewajiban, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ayah adalah kepala keluarga. Ibu adalah ibu rumah tangga dengan tugas utama mengurus rumah tangga dan berke-wajiban mendidik anak-anak, serta menyediakan makanan yang bergizi tinggi agar keluarga tetap sehat. Pola marginalisasi perempuan dalam dunia pendidikan lewat teks pelajaran ini merupakan manifestasi stereotip yang bisa dilihat sebagai bagian dari tradisi masyarakat yang meletakkan perempuan di wilayah domestik.⁵

Bias gender dalam teks-teks pelajaran disebabkan karena ternyata sebagian besar pengarang buku pelajaran adalah laki-laki. Mereka akan memposisikan kelompok laki-laki sesuai dengan pandangan mereka terhadap peran laki-laki dan peran perempuan. Ketidaksadaran atau kekurangtahuan pengarang berpengaruh terhadap karangan yang bias gender. Keadaan tersebut terus berlangsung secara terus menerus tanpa ada yang menyadari sehingga murid dan guru pun akan menerapkan ketidakadilan gender tersebut secara formal di sekolah.⁶

Model kurikulum itu menunjukkan adanya pembakuan peran sosial untuk perempuan karena di situ ditekankan sosialisasi pengetahuan tentang pekerjaan kerumahtanggaan ketimbang pengetahuan keilmuan dan keterampilan teknis. Konsekuensinya, kurikulum semacam itu cenderung menghadapi kegagalan dalam mempersiapkan potensi perempuan untuk berkiprah di dunia luas, kecuali perannya sebagai istri dan ibu.

Dampak dari sosialisasi peran gender yang timpang dalam teks pelajaran, maupun lewat proses pembelajaran, dapat berimplikasi negatif dengan mempersempit pilihan-pilihan dan peluang-peluang kehidupan masa depan yang dimiliki anak perempuan. Pendidikan yang bias gender tidak menjalankan fungsinya untuk membebaskan (*to liberate*) kaum perempuan dari ketimpangan sistem patriarkal, sehingga pada gilirannya

⁵ Karlina Leksono-Supelli, "Pendidikan Untuk Pemahaman", dalam Sindhunata (ed), *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 130-131.

⁶ Mary Astuti, "Pendidikan Berperspektif Gender", dalam Sindhunata (ed), *Ibid.*, 149.

perempuan tetap menjadi warga negara kelas dua yang kurang mampu mengaktualisasikan dan berkontribusi seluruh potensinya secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Selain faktor teks pelajaran, penyebab ketidakadilan gender secara formal terus terjadi karena kurang peka dan kurang sadarnya para birokrat di jajaran Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Mereka mengevaluasi kurikulum dan mengawasi pelaksanaan pendidikan tanpa melakukan evaluasi dengan memperhatikan keadilan gender. Untuk meningkatkan keadilan gender di bidang pendidikan, para birokrat harus meningkatkan kesadaran dan kepekaan gendernya, dan tidak selalu menggunakan standar laki-laki, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan.⁸

Faktor lainnya adalah ketidaktahuan guru. Ketidaktahuan ini, terutama dalam aspek penggunaan teks pelajaran bias gender, dapat dipahami mengingat memang konsep gender belum tersosialisasi secara menyeluruh. Kesetaraan gender baru menyentuh kalangan terdidik di Perguruan Tinggi dan mereka yang *concern* dalam gerakan kesetaraan gender. Ketidakepekaan guru, termasuk guru perempuan, terhadap kemungkinan ketidakadilan gender bisa jadi karena ketidakberanian untuk mendobrak kemapanan yang ada.

Namun sesungguhnya kondisi semacam ini kemudian membawa implikasi yang sangat luas. Mereka umumnya kurang menyadari bahwa yang lebih banyak disuruh mengerjakan soal matematika adalah laki-laki, yang lebih banyak disuruh menyanyi adalah perempuan, yang banyak disuruh mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia adalah perempuan, yang lebih banyak disuruh menjawab pertanyaan guru adalah laki-laki. Guru acapkali tidak mengungkapkan lebih jauh bahwa anak yang diam, atau anak yang tidak menunjukkan jari untuk menjawab pertanyaan, boleh jadi anak yang pandai namun malu untuk menjawab karena umumnya anak perempuan kurang berani menyampaikan pendapat. Jika dilacak lebih

⁷ Yayah Khisbiyah, "Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme", dalam Sindhunata (ed), *Ibid.*, 156.

⁸ *Ibid.*

jauh, kondisi ini merupakan implikasi lebih jauh dari keberadaannya di rumah yang tidak diberi kebebasan, anak perempuan yang harus selalu patuh dengan perintah orang tuanya sehingga kebiasaan tersebut akan terbawa ke sekolah, sehingga kalau di suruh menjawab pertanyaan, mereka tidak akan mengacungkan tangannya.

Jika dirunut lebih jauh, ketimpangan pendidikan perempuan lebih disebabkan karena masyarakat masih berpandangan *male oriented*, yaitu suatu pandangan yang mengedepankan pendidikan laki-laki daripada perempuan. Dengan konsep bahwa anak laki-laki kelak menjadi kepala keluarga, maka jika dalam sebuah keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan dengan ekonomi pas-pasan, pasti mereka akan mendahulukan pendidikan tinggi anak laki-lakinya daripada anak perempuan. Anggaran pemerintah terhadap pendidikan di banyak negara -terutama negara berkembang- memang lebih kecil dibanding anggaran yang lain. Kondisi ini menyebabkan pendidikan bukan saja konsumsi mewah yang tak banyak dijangkau masyarakat umum, namun juga menciptakan masyarakat berkelas; orang awam dan orang berpendidikan. Hanya mereka yang punya uang yang mampu sekolah, sebab ternyata beasiswa tidak untuk semua orang. Kemiskinan tentu bukan satu-satunya sebab yang memarginalkan pendidikan perempuan. *Male oriented* juga paralel dengan budaya yang kuat mengakar bahwa perempuan tidak sepantasnya berpendidikan tinggi karena nanti hanya akan ke dapur. Persepsi ini tidak diluruskan bahwa peran di dapurpun menuntut pengetahuan. Tanpa tahu nutrisi yang baik, mustahil perempuan bisa menyiapkan menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga. Koran Tempo edisi November menurunkan laporan bahwa mempunyai istri yang cerdas lebih menguntungkan terutama dalam hubungannya dengan gizi keluarga, tapi tidak sebaliknya, kalau seseorang mempunyai suami cerdas. Budaya bahwa perempuan adalah *konco wingking*, sehingga tak perlu dididik juga turut mensubordinatkan perempuan. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa pendidikan -dalam arti yang sebenar-benarnya- bagi perempuan bukan ketertinggalan yang harus dikejar, tapi dilanggengkan. Memang banyak perempuan sekarang yang sudah memegang peranan penting, tapi itu hanya represen-

tasi kecil yang belum mencapai keterwakilan penduduk di muka bumi dan harus dicatat tidak semuanya punya *sense of gender*.⁹

III. Rendahnya Partisipasi

Marginalisasi perempuan dalam dunia pendidikan bukan hanya didasarkan kepada asumsi semata. Data-data yang ada menunjukkan bahwa memang kaum perempuan senantiasa berada pada posisi yang terpinggirkan. Salah satu indikatornya adalah dengan melihat tingkat partisipasi. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan memang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki.

Data statistik dari "Indonesia Educational Statistic in Brief", sebagaimana dikutip Gadis Arivia,¹⁰ memaparkan bahwa ketimpangan partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan yang paling mencolok terdapat di provinsi Maluku, Jawa Timur, Lampung, dan DKI Jakarta. Sedangkan perbedaan yang tipis terdapat di provinsi Kalimantan Tengah, DI Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Persentasi Laki-laki dan Perempuan untuk Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 1999/2000

No	Provinsi	Laki-laki	Persen	Perempuan	Persen	Total Murid
1.	Maluku	190.689	52,16	174.898	47,84	365.587
2.	Jawa Timur	1.679.202	52,07	1.545.843	47,93	3.225.045
3.	Lampung	536.280	52,05	494.045	47,95	1.030.325
4.	DKI Jakarta	423.178	52,02	390.375	47,98	813.553
5.	Kalimantan Tengah	134.216	50,63	130.878	49,37	265.094
6.	DI Aceh	299.928	50,90	289.356	49,10	589.284
7.	Sulawesi Tenggara	156.095	51,07	149.572	48,93	305.667
8.	Sulawesi Selatan	566.048	51,20	539.532	48,80	1.105.580

⁹ Ketidakadilan gender juga masuk ranah pendidikan pesantren. Baca Ala'i Najib, "Yang Luput; Pendidikan Perempuan", dalam www.rahima.or.id edisi 27 September 2007.

¹⁰ Gadis Arivia, *Feminisme, Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Kompas, 2006), 407-408.

Ketimpangan tingkat partisipasi ternyata semakin meningkat seiring tingginya jenjang pendidikan. Pada tingkat Perguruan Tinggi, perbedaan tingkat partisipasi terlihat sangat mencolok.

**Persentasi Laki-laki dan Perempuan untuk Tingkat Pendidikan
SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi Tahun Ajaran 1999/2000**

No	Pendidikan	Laki-laki (persen)	Perempuan (persen)
1.	SLTP	51,40	48,60
2.	SLTA	56,42	43,58
3.	Perguruan Tinggi	56,42	43,58

Sumber: Indonesia Educational Statistics in Brief

Ada beberapa alasan mengapa perbedaan gender dalam kuantitas dan jenjang pendidikan tetap ada. *Pertama*, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia. SD terdapat di hampir semua desa di Indonesia dan seorang murid SD tidak perlu keluar desa untuk bersekolah. Akan tetapi, seseorang harus menempuh perjalanan jauh bila bersekolah di SLTP, apalagi SLTA, yang umumnya terkonsentrasi di kota. Banyak orangtua enggan bila anak perempuan mereka bersekolah di tempat yang jauh karena akan kehilangan bantuan kerja.

Kedua, makin tinggi tingkat pendidikan, kian mahal biayanya. Orangtua dari keluarga miskin lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki karena tenaga perempuan lebih banyak dibutuhkan di rumah. *Ketiga*, investasi dalam pendidikan bagi perempuan kerap kali tidak banyak dirasakan orangtua karena setelah menikah ia akan menjadi anggota keluarga suaminya.¹¹

¹¹ Budi Rajab, "Perempuan dan Pendidikan", *Kompas*, 19 September 2007.

Data-data ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat jika kita mencermati terhadap statistik tamatan sekolah. Data-data statistik secara konsisten menunjukkan bahwa laki-laki sekali lagi duduk di peringkat atas kecuali dalam level tamatan D1 dan D2, dimana pada level ini perempuan sedikit lebih unggul. Keunggulan perempuan pada jenjang tamatan ini dapat diperkirakan karena level D1 dan D2 lebih banyak menawarkan pendidikan praktis, atau pendidikan yang berorientasi kerja.

Sebagai bahan perbandingan, dari data BPS mulai tahun 1980-1990 misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata angka masuk perempuan ke lembaga pendidikan lebih kecil bila dibandingkan dengan angka masuk laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan. Tingkat SD, perbandingan perempuan dengan laki-laki adalah 49.18 %:50.83 %, di tingkat SMP; 46.34%:53.56%, di tingkat SMA; 41.45 %:58.57%, di perguruan tinggi; 33.60%:66.40%. Tentu saja, untuk tingkat yang lebih tinggi, kesempatan perempuan akan jauh lebih sedikit. Kesempatan yang kecil ini berimbas juga pada posisi-posisi lain bagi perempuan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Di parlemen kita hanya ada 8 % perempuan, begitu juga di DPR di daerah. Di Malang misalnya, dari total 45 anggota DPRD hanya ada 4 orang perempuan, dan di Kota Cirebon tidak ada seorangpun perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota DPRD.¹²

IV. Strategi

Satu aspek penting yang tidak bisa dikesampingkan jika ingin membangun dunia pendidikan yang berkeadilan tanpa adanya ketimpangan gender adalah dengan merestrukturisasi kurikulum. Sebab, kurikulum merupakan salah satu manifestasi dari segala relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta segala persoalan kesetaraan lainnya. Dengan demikian, formulasi kurikulum yang gender sensitif akan terbangun.

¹² Lihat *Jurnal Perempuan*, No. 23 Tahun 2002, 7-16.

Selain kurikulum, aspek lain yang seharusnya diperhatikan adalah cara pengajaran di kelas. Dalam pengajaran, seharusnya ditumbuhkan pengetahuan, sikap dan kesadaran kritis kepada para siswa, menekankan pentingnya kesetaraan gender, dan menghindari penggunaan bahasa yang bias gender. Ada tiga rangkaian yang menjadi titik tekan dalam gerakan kesetaraan gender dalam pembahasan kurikulum, yaitu guru, murid dan pengetahuan yang disampaikan, atau yang diproduksi oleh institusi pendidikan.¹³

Dalam kerangka operasionalisasi dari tiga arus penting di atas, guru merupakan agen penting dalam penyampaian pesan kurikulum. Para guru perlu memahami dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Guru bukan saja menyampaikan pelajaran secara harfiah, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap pelajaran yang disampaikan. Dengan demikian, meminjam terminologi Paulo Freire, pengajaran yang dipakai bukan pengajaran “bank”, tetapi sistem yang memberikan pemahaman.¹⁴ Dalam setiap mata pelajaran ada suatu pemahaman yang ingin disampaikan. Dalam pemahaman tersebut dibutuhkan keahlian menginterpretasi bahan. Konsep pengertian kurikulum yang luas melibatkan interpretasi yang kritis dari para guru. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mempunyai pemikiran yang terbuka agar interpretasi setiap pelajaran mempunyai wawasan yang luas dan mendalam.

Untuk mengetahui bagaimana capaian yang telah dicapai oleh murid, maka model evaluasinya seyogyanya menghindari cara yang kaku dan mekanis. Penerapan aturan-aturan buta tanpa adanya keterbukaan untuk berargumen hanya mengakibatkan murid menjadi pasif dan tidak otentik. Seluruh kegairahan belajar hanya bertumpu pada peraih nilai setinggi-tingginya yang tidak dimengerti dasar pemikirannya. Guru pun menilai murid dalam keseragaman, tiak ada usaha untuk memahami murid dari keunikannya dan keorisinalitasannya.

¹³ *Ibid.*, 421.

¹⁴ Lihat buku Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 1985), 51.

Carut marutnya dunia pendidikan kita karena murid yang dididik adalah murid yang diajarkan untuk bersifat pragmatis dalam pengertian negatif sehingga tingkat kognitif yang berkembang adalah pada tingkat praktis. Bila kurikulum yang sifatnya luas mencakup pemahaman-pemahaman terhadap realitas sebagai fokus yang diutamakan, maka murid harus diperkenalkan dengan isu-isu HAM, keadilan, dan demokrasi. Sistem hafalan yang tidak membangkitkan kesadaran hanya akan mendorong perbudakan dan budaya bisu suatu bangsa yang tidak akan bisa kreatif. Inilah yang dalam konsepsi Freire disebut pendidikan hadap masalah, yaitu guru bisa belajar dari murid, dan murid belajar dari guru. Dalam konsepsi ini, guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri, dan menstimulir daya pemikiran kritis murid-muridnya. Karenanya, mereka saling memanusiakan. Guru dan murid dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengerti secara kritis mengenai dirinya sendiri dan dunianya. Dengan demikian, mereka saling memanusiakan.¹⁵

Dengan demikian, produksi pengetahuan merupakan sesuatu hal yang penting. Dalam upaya memproduksi pengetahuan, perlu dipertanyakan posisi institusi yang menjalankan pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional misalnya, perlu mengambil peranan yang penting dalam mendorong kurikulum yang berperspektif luas dan kritis. Dengan peranan ini diharapkan dapat terkonstruksi sebuah sistem pendidikan berkeadilan tanpa adanya ketimpangan gender.

Selain itu, konstitusi secara jelas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjamin hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Program pembangunan nasional yang responsif gender juga ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Dijelaskan bahwa program peningkatan kualitas hidup perempuan memiliki sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan peranan perempuan di berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, sasaran program akan dicapai melalui berbagai ke-

¹⁵ *Ibid.*, 62-63.

giatan pokok yang tercantum dalam program pendidikan pra-sekolah, pendidikan menengah, program pendidikan tinggi, dan program pembinaan pendidikan luar sekolah. Sayangnya, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, program kerja yang konkret untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan belum sepenuhnya terlaksana.

Oleh karena itu, sejumlah upaya untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan dan laki-laki dalam pendidikan harus segera dilaksanakan, di antaranya: *Pertama*, menciptakan sistem pendidikan yang sensitif gender untuk menjamin persamaan kesempatan pendidikan dan pelatihan. *Kedua*, menghapuskan disparitas gender dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Dan *ketiga*, memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk menjamin bahwa perempuan memperoleh pengetahuan, keterampilan kapasitas, sehingga diharapkan dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Program ini mesti dirancang dengan memastikan adanya indikator manfaat yang terukur bagi perempuan dan anak perempuan, baik dalam peningkatan kesempatan anak perempuan dan perempuan dalam memperoleh pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan memberikan bea siswa kepada anak perempuan pada kurun waktu tertentu.

Selain itu, aspek yang penting untuk dilakukan adalah melakukan analisa bersama tentang kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Dalam konteks ini, strategi yang ditawarkan Ace Suryadi menarik untuk diapresiasi. Menurut Suryadi, analisa kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengajak untuk sama-sama berfikir dan mensosialisasikan kesetaraan gender, khususnya kesetaraan dalam memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
2. Memberikan gambaran yang lebih jelas melalui angka-angka statistik dan indikator pendidikan secara nasional maupun per satuan wilayah, serta gambaran per sektor yang menunjukkan

adanya kesenjangan gender yang disebabkan karena alasan pendidikan.

3. Mempertegas upaya kesetaraan gender yang sudah berhasil dan yang masih perlu terus diupayakan dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan berdasarkan jenjang, jenis dan jalur pendidikan mulai dari tingkatan SD dan yang sederajat sampai perguruan tinggi dan yang sederajat.
4. Dapat memberikan masukan yang akurat untuk penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan dalam mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
5. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukan sebagai pengambilan keputusan, pengelola pendidikan, tenaga kependidikan maupun sebagai peserta didik.
6. Memberikan masukan dalam upaya memperkecil kesenjangan gender pada proses penjurusan, bidang keahlian, atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi (PT) untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme.
7. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jurusan atau program keahlian pada semua jenjang pendidikan, khususnya untuk program-program keahlian atau jurusan yang bias laki-laki, melalui perbaikan dalam sistem penerimaan siswa/ mahasiswa baru dan penjurusan, sehingga dapat menyeimbangkan proporsi siswa/ mahasiswa menurut gender.
8. Memberikan masukan dalam upaya meningkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan menurut gender serta partisipasi perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan di bidang pengelolaan pendidikan nasional, yang pada saat ini masih terdapat kesenjangan.¹⁶

¹⁶ Ace Suryadi, *Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan* (Bandung: Genesindo, 2004), 22.

V. Kesimpulan

Ketertinggalan perempuan dalam pendidikan perlu dikejar dalam waktu yang lama dan secara terus menerus sebab pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Sekarang ini, meski agenda gerakan perempuan sudah dilihat keberhasilannya, namun perempuan belum banyak memasuki sektor-sektor penting terutama yang menyangkut kebijakan. Bahkan mungkin banyak perempuan mengkhususkan menekuni isu kesetaraan gender daripada isu-isu lain. Mungkin ini wajar, sebab ketidakadilan gender seharusnya memang menjadi kerja besar bagi kita untuk menghapuskannya. Jika kita hanya berkutat terus pada wacananya, kita akan kehilangan startnya kembali. Penuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam segala bidang adalah omong kosong tanpa diikuti pendidikan formal maupun non formal. Dalam konteks inilah, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan membutuhkan kerja keras dan kesadaran semua pihak untuk memperjuangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Neni Utami. "Setelah Perempuan Berpendidikan Lalu? (Cermatan di peringatan 23 tahun Ratifikasi CEDAW, 24 Juli)", dalam www.mennegpp.go.id.
- Arivia, Gadis. *Feminisme, Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Astuti, Mary. "Pendidikan Berperspektif Gender", dalam Sindhunata (ed), *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Jurnal Perempuan*. No. 23 Tahun 2002.
- Khisbiyah, Yayah. "Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme" dalam Sindhunata (ed), *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Najib, Ala'i. "Yang Luput; Pendidikan Perempuan", dalam www.rahima.or.id.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rajab, Budi. "Perempuan dan Pendidikan", *Kompas*, 19 September 2007.
- Supelli, Karlina Leksono. "Pendidikan Untuk Pemahaman", dalam Sindhunata (ed), *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Suryadi, Ace. *Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan*, Bandung: Genesindo, 2004.

